Pangripta Sembada : Jurnal Perencanaan Pembangunan, Vol. 1 No. 2 2024, pp.79-98
ISSN: 3090-3173

ANALISIS PENYEBAB DAN PENDEKATAN SOLUSI MASALAH LAHAN SAWAH BERA: STUDI KASUS DI KAPANEWON MAYUDAN KABUPATEN SLEMAN

Ratih Ineke Wati[1], Cahyo Wulandari[2], Fransiskus Xaverius Wagiman[3]
[1]Program Studi Penyuluhan dan Komunikasi Pertanian, Universitas Gadjah Mada,
[2]Program Studi Ilmu Tanah, Universitas Gadjah Mada,
[3]Program Studi Hama dan Penyakit Tumbuhan, Universitas Gadjah Mada,
ratihinekewati@ugm.ac.id

ABSTRAK

Alih fungsi lahan pertanian yang terus meningkat di kawasan potensi pertanian membuat keberadaan lahan sawah bera menjadi isu menarik untuk dikaji. Pada tahun 2024, Kapanewon Moyudan tercatat memiliki 2% lahan sawah bera yang belum pasti akan dioptimalkan kembali penggunaannya untuk usaha tani. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penyebab dan merekomendasikan pendekatan solusi untuk mengatasi problematika lahan sawah bera di Kapanewon Moyudan. Metode penelitian menggunakan *mix methods* dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, *focus group discussion*, wawancara terstruktur, dan kajian literatur. Penelitian dilakukan pada bulan Mei-Oktober 2024 di Kapanewon Moyudan yang memiliki luasan lahan sawah bera tertinggi di Kabupaten Sleman bagian barat. Hasil penelitian menemukan bahwa permasalahan lahan sawah bera adalah (1) teknis (ketersediaan air dan serangan hama tikus); (2) ekonomi (keterbatasan permodalan dan biaya operasional tinggi), dan (3) sosial (regenerasi petani rendah dan kepercayaan petani rendah). Pendekatan solusi yang dilakukan adalah: (1) demplot komoditas Talas Pratama dengan pertimbangan mampu mengatasi masalah teknis; (2) memperkuat modal finansial petani dalam bentuk skema bantuan pengadaan saprodi dan alsintan yang sesuai dengan hasil identifikasi kebutuhan untuk mengatasi masalah ekonomi; (3) meningkat peran petani muda sehingga dapat menjadi *role model* bagi yang lain untuk mengatasi masalah sosial; serta (4) memperkuat kepercayaan petani dengan meningkatkan modal sosial pada kelompok tani dan PPL untuk mengatasi masalah sosial.

Kata Kunci: Lahan Sawah Bera, Pemasalahan Lahan Sawah Bera, Solusi Lahan Sawah Bera

ABSTRACT

The increasing of agricultural land conversion in agricultural potential areas makes the existence of fallow paddy fields as an interesting issue to study. In 2024, Moyudan District was recorded having 2% of fallow paddy fields that had not be re-optimized for farming use yet. This study aims to analyze the causes and recommend alternative solution approach to overcome the problems of fallow paddy fields in Moyudan District. The research method used mix methods with data collection techniques through observation, focus group discussions, structured interviews, and literature reviews. The study was conducted in May-October 2024 in Moyudan District which has the highest area of fallow paddy fields in the western part of Sleman Regency. The results of the study found that the problems of fallow paddy fields were (1) technical aspect (water availability and rat pest attacks); (2) economic aspect (limited capital and high operational costs), and (30029 social aspect (low farmer regeneration and low farmer trust). The solution approaches used were: (1) demonstration plots of Talas Pratama commodities with the consideration of being able to overcome technical problems; (2) strengthening farmers'

financial capital in the form of assistance schemes for the procurement of agricultural inputs and agricultural machinery in accordance with the results of the identification of needs to overcome economic problems; (3) increasing the role of young farmers so that they can become role models for others to overcome social problems; and (4) strengthening farmer confidence by increasing social capital in farmer groups and PPL to overcome social problems.

Keywords: fallow paddy fields, the causes of fallow paddy fields, the solution of fallow paddy fields

PENDAHULUAN

Pertanian merupakan sektor yang memberikan sumbangsih paling tinggi dalam penyerapan tenaga kerja di Indonesia. Pada bulan Februari 2024, sebesar 28,64 % penduduk usia 15 tahun ke atas tercatat menekuni pekerjaan utama di bidang pertanian, perburuan, dan perikanan (Badan Pusat Statistik Indonesia, 2024). Potensi Indonesia sebagai negara agraris didukung oleh iklim tropis dengan curah hujan relatif tinggi membuat aktivitas pertanian secara luas (meliputi kegiatan *on farm* dan *off farm* pada komoditas tanaman pangan, hortikultura, perikanan, peternakan, dan kehutanan) melekat dan menjadi bagian dari budaya Bangsa Indonesia. Pertambahan penduduk yang begitu pesat dengan laju rata-rata 1,11% per tahun menyebabkan tuntutan kebutuhan hidup masyarakat semakin meningkat dan beranekaragam (Badan Pusat Statistik Indonesia, 2024). Tingginya kebutuhan pangan bersinergi dengan tingginya kebutuhan sandang, papan, pendidikan, hiburan, serta infrastruktur yang memadahi guna memperlancar aktivitas sehari-hari. Pembangunan daerah berbasis modernisasi dan teknologi menggeser kegiatan konvensional seperti perburuan dan pertanian. Alih fungsi lahan ke bidang-bidang non-pertanian terus berlangsung dengan berbagai dasar pertimbangan demi memfasilitasi pemenuhan kebutuhan penduduk.

Kabupaten Sleman merupakan salah satu kabupaten di Daerah Istimewa Yogyakarta yang memiliki potensi pertanian yang tinggi. Lahan pertanian tergolong subur dengan dukungan irigasi teknis dari Selokan Mataram. Pemekaran pembangungan Kabupaten Sleman telah dikategorikan berdasararkan penggunaannya. Pertama, lahan pertanian (sawah abadi) dipusatkan di 4 (empat) kecamatan/kapanewon yaitu: Kapanewon Gamping, Kapanewon Minggir, Kapanewon Turi, dan Kapanewon Mayudan. Kedua, lahan penyangga ditetapkan di 3 (tiga) kecamatan/kapanewon yaitu Kapanewon Cangkringan, Kapanewon Ngaglik, dan Kapanewon Sayegan. Ketiga, lahan

permukiman (perkembangan perkotaan) di 10 kecamatan/kapanewon yaitu Kapanewon Tempel, Kapanewon Sleman, Kapanewon Pakem, Kapanewon Mlati, Kapanewon Godean, Kapanewon Depok, Kapanewon Berbah, Kapanewon Prambanan, Kapanewon Kalasan, dan Kapanewon Ngemplak (Martanto & Andriani, 2021). Berdasarkan pengkategorian ini, optimalisasi lahan dapat dilakukan dengan merujuk pada peruntukannya masing-masing.

Permasalahan muncul ketika perencanaan wilayah yang sudah ditetapkan tidak dapat direalisasikan karena satu dan lain hal. Kapanewon Moyudan yang masuk sebagai wilayah pertanian (sawah abadi) belum dikelola secara maksimal karena masih ditemukan banyaknya lahan sawah dalam kondisi bera (lihat Gambar 1). Berdasarkan Data Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan, Kabupaten Sleman pada Februari 2024, lahan sawah bera di Kapanewon Moyudan mencapai 140 hektar dari total sawah 1.267,72 hektar atau sekitar 2% dari total sawah. Penelitian ini mencoba untuk menganalisis penyebab dan pendekatan solusi masalah lahan sawah bera di Kapanewon Moyudan yang sesungguhnya memiliki potensi besar dalam pembangunan pertanian di tengah tingginya alih fungsi lahan dan lambatnya regenerasi petani.

Gambar 1. Kondisi lahan sawah bera di Kalurahan Sumbersari Kapanewon Moyudan
Sumber: Dokumentasi Pribadi (2024)

METODE PENELITIAN

Penelitian menggunakan metode dasar *mix method* dengan pendekatan deskriptif kualitatif dan kuantitatif. Penelitian *mix method* merupakan metode yang mengintegrasikan pengambilan data secara kuantitatif dan kualitatif dalam sebuah penelitian sosial dengan mengkombinasikan berbagai teknik pengumpulan data serta berbagai analisis pendekatan kuantitatif dan kualitatif untuk kemudian dirumuskan menjadi jawaban yang komprehensif atas pertanyaan-pertanyaan penelitian. Teknik implementasi *mix method* bukan pada pengumpulan data kuantitatif dan kualitatif yang diperoleh secara bersamaan dalam satu waktu namun pada proses penelitian multi-strategi untuk mendiskrisikan investigasi penelitian dengan kombinasikan pendekatan kuantitatif dan kualitatif (Bryman, 2016).

Penelitian dilakukan pada bulan Mei-Oktober 2024 di 4 (empat) desa/kalurahan yaitu Kalurahan Sumberrahayu, Kalurahan Sumbersari, Kalurahan Sumberarum, dan

Kalurahan Sumberagung yang terletak di Kapanewon Moyudan, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Kapanewon Moyudan dipilih secara sengaja (*purposive*) sebagai lokasi penelitian karena merupakan kecamatan/desa yang ditetapkan sebagai lahan pertanian (sawah abadi) namun memiliki luasan lahan sawah bera tertinggi di Kabupaten Sleman bagian barat. Metode *purposive* dilakukan ketika peneliti memilih sampel secara sengaja dengan pertimbangan untuk memenuhi tujuan penelitian (Creswell, 2014).

Teknik pengambilan data menggunakan observasi, *Focus Group Discussion* (FGD), wawancara terstruktur dengan kuesioner, dan kajian literasi. FGD dilakukan 2 (dua) kali dimana peserta FGD 1 mengundang Ketua Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) setiap desa, Ketua Kelompok Wanita Tani (KWT) setiap desa, Perwakilan Pemuda Milenial setiap desa, Petugas Penyuluh Lapangan (PPL) setiap desa, Petugas Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan (POPT), Ketua Pokja Bina Produksi, dan Kabid Produksi Tanaman Pangan di Kapanewon Moyudan. Berbeda dengan FGD 1 yang berfokus pada pelaku utama dan sistem pendukung di sekitar petani, FGD 2 merupakan audiensi dari pemangku kebijakan di wilayah Kabupaten Sleman meliputi perwakilan Bappeda (Kabid Perekonomian, Kabid Riset Inovasi Daerah, Perencana Madya), perwakilan Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan, perwakilan Dinas Irigasi, perwakilan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Kalurahan, perwakilan Dinas Koperasi dan UKM, perwakilan Dinas Perindustrian dan Perdagangan, serta perwakilan Kapanewon (Kepala BPP, POPT, PPL, Koord perikanan). Penelitian dengan survei juga dilakukan terhadap 60 responden petani pemilik lahan sawah bera yang diambil secara *proportional random sampling* berdasarkan jumlahnya di masing-masing desa/kalurahan. Adapun jumlah responden yang diambil dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Jumlah Responden Petani Lahan sawah bera Kapanewon Moyudan

Desa/ Kalurahan	Populasi Petani	Proporsi Petani	Responden
Sumberrahayu	16	0,12	7
Sumbersari	90	0,60	36
Sumberarum	29	0,22	13
Sumberagung	4	0,07	4
Jumlah	139	1,00	60

Sumber: Data Primer (2024)

Potret kegiatan penelitian meliputi FGD 1, FGD 2, dan penelitian survei dapat dilihat pada Gambar 2 berikut ini:

Gambar 2. Teknik pengambilan data FGD 1 (gambar pertama), FGD 2(gambar kedua) dan penelitian survei (gambar ketiga dan keempat) di Kapanewon Moyudan
Sumber: Dokumentasi Pribadi (2024)

HASIL PENELITIAN

Lahan sawah bera merupakan metode mengistirahatkan tanah dari perlakuan budidaya pertanian dengan memberikan input tambahan kimiawi ke dalam tanah untuk mengoptimalkan hasil. Lahan yang diistirahatkan dapat membantu dekomposisi unsur hara ke tanah secara alami. Pada komoditas padi, lahan sawah bera juga diperlukan untuk mengistirahatkan lahan dari posisi jenuh terendam air. Permasalahan lahan sawah bera terjadi ketika lahan sawah produktif diistirahatkan terlalu lama hingga bertahun-tahun seperti yang terjadi di Kapanewon Moyudan.

Hasil FGD 1 menunjukkan bahwa penyebab lahan sawah bera di Kapanewon Moyudan dapat dikelompokkan ke dalam 3 (tiga) aspek, yaitu teknis, ekonomi, dan sosial dengan rincian sebagai berikut:

1. Permasalahan lahan sawah bera di aspek teknis yang dominan ditemukan adalah kekurangan air dan serangan hama tikus. Kapanewon Moyudan sesungguhnya telah memiliki infrastruktur irigasi teknis dari Selokan Mataram meskipun beberapa saluran tersier di Kalurahan Sumberrahayu ditemukan dalam kondisi rusak (lihat Gambar 3). Kebutuhan air semakin meningkat karena fanatisme petani untuk tetap

menanam komoditas padi membuat kebutuhan air juga menjadi besar. Di sisi lain, kebijakan penutupan saluran irigasi teknis pada setiap Bulan Oktober seringkali menjadi masalah tersendiri terutama ketika musim kemarau panjang seperti yang terjadi pada tahun 2023 dan 2024. Pembagian air antara aktivitas di sektor pertanian dan perikanan juga menjadi persoalan tersendiri. Beberapa petani mengeluhkan bahwa kegiatan budidaya perikanan mengambil proporsi air yang cukup besar. Kendala teknis lainnya adalah hama tikus yang menjadi sulit terputus karena petani menolak untuk menerapkan metode tanam serempak. Serangan tikus dapat dilihat pada Gambar 4.

Gambar 3. Kondisi Irigasi Teknis di Kalurahan Sumberrahayu Kapanewon Moyudan

Sumber: Dokumenasi Pribadi (2024)

Gambar 4. Dampak Serangan Tikus di Lahan Sawah Kalurahan Sumberrahayu Kapanewon Moyudan

Sumber: Dokumentasi Pribadi (2024)

2. Permasalahan lahan sawah bera di aspek ekonomi dipengaruhi oleh keterbatasan modal, biaya operasional mahal, dan jumlah tenaga kerja terbatas. Lahan sawah bera yang telah lama tidak dikerjakan menyebabkan gulma tumbuh dengan subur. Pembersihan lahan diperlukan dengan konsekuensi biaya operasional menjadi lebih mahal dan membutuhkan tenaga kerja yang menghilangkan gulma sekaligus mengolah lahan. Diperlukan alat dan mesin pertanian (alsintan) khusus untuk dapat membalik tanah sawah dengan gulma yang sudah terlanjur tumbuh dengan lebat dan tinggi. Sejauh ini, alsinta belum tersedia di sekitar petani sehingga akses menjadi sulit. Modal yang dimiliki petani juga terbatas sehingga memilih untuk memberakan lahan sawah.
3. Permasalahan lahan sawah bera di aspek sosial yang disebabkan oleh

petani memiliki pekerjaan lain, minim regenerasi petani, tingkat kepercayaan antarpetani rendah, dan bantuan sosial beras raskin melemahkan dorongan petani untuk bertani. Akses Kapanewon Moyudan ke pusat kota Sleman dan Yogyakarta terjangkau sehingga memudahkan petani memiliki pekerjaan *temporary* untuk menambah pendapatan. Generasi muda tidak banyak yang terjun ke sektor pertanian karena alasan yang sama, yaitu mudah mendapatkan pekerjaan lain karena akses yang mudah. Persoalan aspek sosial yang cukup pelik berada pada Tingkat kepercayaan antarpetani yang sangat rendah. Mereka menolak kesepakatan tanam serempak dan memilih untuk *injen-injenan* (mengintip lahan petani lain) untuk mulai menanam. Mereka tidak maun menjadi yang pertama atau terakhir karena rawan akan dimakan tikus dengan skala kerugian yang besar. Terakhir, motivasi petani makin melemah untuk berusahatani ketika mereka mendapatkan kemudahan mendapatkan bantuan sosial beras raskin. Kebutuhan akan beras sudah tercukupi untuk kelurga tanpa perlu menanam padi di lahan sawah.

Hasil survei terhadap 60 responden petani memperkuat temuan-temuan pada FGD 1. Berdasarkan Tabel 2, lebih dari 50% petani berpersepsi lahan sawah bera disebabkan kondisi lahan yaitu sistem pengairan di Kapanewon Moyudan tidak lancar (66,67%). Lebih dari 50% petani berpersepsi jika faktor luar yang menjadi alasan lahan sawah bera adalah tingginya serangan hama tikus (85%), waktu tanam tidak serempak (61,67%), kurang air akibat perbaikan selokan (90%), kurang air akibat curah hujan kurang (68,34%), tenaga buruh langka (60%), dan banyak sawah diberakan (78,33%). Lebih dari 50% petani berpersepsi bahwa faktor dari petani dikarenakan pandangan bahwa bertani tidak cepat menghasilkan uang (61,67%), tenaga muda tidak berminat bertani (88,34%), tidak berani memulai tanam (*injen-injenan*) karena takut risiko diserang hama (66,66%), tidak setuju pematang batas petak dibongkar apabila lahan akan dikelola pihak lain (63,33%), tidak bersedia lahan sawah bera dijual walupun petani tetap bekerja di lahannya – sitem korporasi pertanian (86,67%), dan sawah sebagai investasi meskipun bera tidak masalah (91,67%). Terkait sarana produksi dan tenaga, lebih dari 50% petani mempersepsikan bahwa harga pupuk pabrik non subsidi tidak terjangkau di sekitar Kapanewon Moyudan (90%), petani menilai pemuda tidak mau menjadi petani (96,67%) dan tidak memiliki keterampilan usaha tani (70%), anak petani tidak mau tidak mau menjadi petani

(53,33%), biaya sarana produksi dan tenaga kerja mahal (91,67%), harga jual saat panen rendah (55%), bertanam sayur dan buah tidak menguntungkan (71,67%), hasil panen tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga (88,33%)dan menerima pendapatan usaha tani apapun selama lahan sawah bera selain rumput untuk ternak (51,67%). Persentase ini diperoleh dari menjumlahkan sangat tidak setuju dan tidak setuju atau setuju dan sangat setuju tergantung pada konteksnya.

Tabel 2 juga menunjukkan bahwa lebih dari 50% petani berpersepsi masih banyak faktor pendukung yang menjadi alasan petani dapat mengaktifkan kembali lahan sawah bera. Petani berpersepsi jika Kapanewon Moyudan memiliki kondisi lahan yang subur (98,33%), mudah diolah (93,33%), dan mudah ditanami berbagai komoditas (95%). Petani merasa mudah menemukan penyewa (63,34%) dan penyakap lahan sawah (63,33%), pertemuan kelompok tani dan gapoktan melakukan musyawarah tentang permasalahan lahan sawah bera (73,33%), harga panen terkendali (68,34%), alih fungsi lahan pertanian tidak terjadi secara signifikan (76,66%), serta kelompok tani dan PPL mendorong petani untuk tidak memberakan sawah (65%). Petani juga menolak jika bertani merupakan usaha sampingan saja (68,34%), Bertani dengan cara biasanya menguntungkan (80%), pemilik lahan sawah berada di luar daerah sehingga sulit dijangkau (91,66%), petani tidak memiliki cukup waktu untuk bertani (80%), petani berusia lanjut dan tidak lagi sanggup bertani (65%), tidak ada modal dan tidak berani hutang (63,33%), tidak melakukan kegiatan bersama sesuai kesepakatan (gropyokan tikus, tanam serempak, bersihkan saluran air) (71,67%), ikut tetangga yang juga memberakan sawah (75%), kurang mandiri sehingga tergantung pada bantuan pemerintah dan/atau pihak lain (91,66%), serta keluarga mendukung memberakan lahan (86,57%). Petani berpersepsi jika saprodi meliputi pupuk pabrik non subsidi (90%), pupuk organik (63,33%), pestisida (98,33%), dan benih (98,33%) mudah diakses di sekitar Kapanewon Moyudan. Mereka juga membuat sendiri pupuk organik (68,33%). Mereka berpersepsi jika bertanam padi menguntungkan (65%). Ketika memberakan tanah, petani petani tetap mengeluarkan biaya usaha tani seperti pajak tanah sawah (68,33%). Sama dengan sebelumnya, persentase didapatkan dari penambahan sangat tidak setuju dan tidak setuju atau setuju dan sangat setuju tergantung pada konteksnya.

Tabel 2. Persentase Persepsi Petani tentang Penyebab Lahan Sawah Bera di Kapanewon Moyudan

Kondisi lahan	Sangat Tidak Setuju		Tidak Setuju		Ragu-ragu		Setuju		Sangat Setuju	
	Σ	%	Σ	%	Σ	%	Σ	%	Σ	%
Lahan pertanian di Moyudan tergolong subur	0	0	1	1,67	0	0,00	32	53,33	27	45,00
Sistem pengairan di Moyudan lancar	21	35	19	31,67	6	10,00	13	21,67	1	1,67
Tanah pertanian di Moyudan mudah diolah	0	0	3	5,00	1	1,67	43	71,67	13	21,67
Lahan pertanian di sekitar Moyudan mudah ditanami komoditas apapun	0	0	2	3,33	1	1,67	43	71,67	14	23,33
Lahan sengaja diberakan karena faktor luar	Sangat Setuju		Setuju		Ragu-ragu		Tidak Setuju		Sangat Tidak Setuju	
	Σ	%	Σ	%	Σ	%	Σ	%	Σ	%
Tikus	25	41,67	26	43,33	1	1,67	8	13,33	0	0
Waktu tanam tidak serempak	7	11,67	30	50	2	3,33	15	25	6	10
Kurang Air akibat perbaikan selokan	31	51,67	23	38,33	0	0	5	8,33	1	1,67
Kurang Air akibat curah hujan kurang	10	16,67	31	51,67	3	5	12	20	4	6,67
Tenaga buruh (traktor, tanam, dll.) langka	7	11,67	29	48,33	1	1,67	19	31,67	4	6,67
Tidak ada penyewa	3	5	10	16,67	9	15	19	31,67	19	31,67
Tidak ada penyakap	3	5	10	16,67	9	15	21	35	17	28,33
Di Moyudan banyak sawah diberakan	5	8,33	42	70	3	5	6	10	4	6,67
Lahan sawah bera tidak pernah dimusyawarahkan dalam pertemuan kelompok tani dan gapoktan	1	1,67	14	23,33	1	1,67	32	53,33	12	20
Harga jatuh saat panen	1	1,67	16	26,67	2	3,33	34	56,67	7	11,67
Belum ada kebijakan Pemerintah terkait solusi lahan sawah bera	10	16,67	34	56,67	1	1,67	5	8,33	10	16,67

Lahan pertanian di Moyudan berubah menjadi lahan bukan pertanian (tol, rumah, toko, pabrik, dll)	0	0	10	16,67	4	6,67	29	48,33	17	28,33
Kelompok tani, PPL, mendukung memberakan sawah	0	0	2	3,33	19	31,67	20	33,33	19	31,67
Lahan sengaja diberakan karena faktor petani	Sangat Setuju		Setuju		Ragu-ragu		Tidak Setuju		Sangat Tidak Setuju	
	Σ	%	Σ	%	Σ	%	Σ	%	Σ	%
Bertani usaha sampingan saja	4	6,67	14	23,33	1	1,67	31	51,67	10	16,67
Bertani seperti cara biasanya tidak untung	3	5	7	11,67	2	3,33	45	75	3	5
Bertani tidak cepat hasilkan uang	3	5	34	56,67	0	0	19	31,67	4	6,67
Pemilik lahan di luar daerah	0	0	3	5	2	3,33	29	48,33	26	43,33
Tidak cukup waktu	3	5	6	10	3	5	28	46,67	20	33,33
Usia lanjut, tidak sanggup bertani	2	3,33	17	28,33	2	3,33	32	53,33	7	11,67
Tenaga muda tidak minat bertani	10	16,67	43	71,67	1	1,67	4	6,67	2	3,33
Tidak ada tenaga kerja keluarga	1	1,67	26	43,33	4	6,67	25	41,67	4	6,67
Tidak ada modal, tidak berani hutang	1	1,67	20	33,33	1	1,67	29	48,33	9	15
Tidak berani memulai tanam (*injen-injenan*), takut risiko diserang hama	5	8,33	35	58,33	1	1,67	16	26,67	3	5
Tidak melakukan kegiatan bersama sesuai kesepakatan (gropyokan tikus, tanam serempak, bersihkan saluran air)	2	3,33	13	21,67	2	3,33	36	60	7	11,67
Ikut tetangga yang juga memberakan sawah	1	1,67	13	21,67	1	1,67	28	46,67	17	28,33
Tidak setuju pematang batas petak dibongkar	5	8,33	33	55	2	3,33	9	15	10	16,67

apabila lahan akan dikelola pihak lain										
Kurang mandiri, tergantung pada bantuan Pemerintah dan/atau pihak lain	1	1,67	3	5	1	1,67	38	63,33	17	28,33
Tidak bersedia lahan sawah bera dijual walupun petani tetap bekerja di lahannya	19	31,67	33	55	1	1,67	3	5	4	6,67
Punya sawah untuk investasi, bera tidak masalah	21	35	34	56,67	1	1,67	1	1,67	3	5
Keluarga mendukung saya memberakan lahan	0	0	16	26,67	12	20	16	26,67	16	26,67
Saprodi dan tenaga	Sangat Tidak Setuju		Tidak Setuju		Ragu-ragu		Setuju		Sangat Setuju	
	Σ	%	Σ	%	Σ	%	Σ	%	Σ	%
Pupuk pabrik non subsidi mudah didapat di sekitar Moyudan	0	0,00	5	8,33	1	1,67	33	55,00	21	35,00
Harga Pupuk pabrik non subsidi terjangkau di sekitar Moyudan	14	23,33	40	66,67	2	3,33	4	6,67	0	0,00
Pupuk organik dibuat sendiri	2	3,33	14	23,33	3	5,00	29	48,33	12	20,00
Pupuk organk dijual di sekitar Moyudan	3	5,00	12	20,00	7	11,67	34	56,67	4	6,67
Pestisida mudah didapat di sekitar Moyudan	0	0,00	1	1,67	0	0,00	45	75,00	14	23,33
Benih padi mudah didapat	0	0,00	1	1,67	0	0,00	47	78,33	12	20,00
Generasi muda di Moyudan banyak yang menjadi petani	13	21,67	45	75,00	1	1,67	1	1,67	0	0,00
Anak petani di Moyudan memiliki keterampilan bertani	3	5,00	39	65,00	12	20,00	6	10,00	0	0,00
Anak petani di Moyudan meneruskan usaha tani keluarga	3	5,00	29	48,33	12	20,00	12	20,00	4	6,67

Biaya usaha tani dan pemasaran	Sangat Setuju		Setuju		Ragu-ragu		Tidak Setuju		Sangat Tidak Setuju	
	Σ	%	Σ	%	Σ	%	Σ	%	Σ	%
Biaya saprodi (benih, pupuk, pesitisida) dan tenaga mahal di sekitar Moyudan (unfavorable)	8	13,33	47	78,33	1	1,67	4	6,67	0	0,00
Bertanam padi tidak untung (unfavorable)	0	0,00	6	10,00	15	25,00	38	63,33	1	1,67
Bertanam sayur dan buah menguntungkan	0	0,00	2	3,33	15	25,00	33	55,00	10	16,67
Hasil panen mudah dipasarkan	0	0,00	10	16,67	1	1,67	44	73,33	5	8,33
Harga jual saat panen rendah (*unfavorable*)	2	3,33	31	51,67	7	11,67	20	33,33	0	0,00
Hasil panen cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga	0	0,00	3	5,00	4	6,67	39	65,00	14	23,33
Tidak mengeluarkan biaya usaha tani apapun selama lahan sawah bera (contoh: pajak, iuran kelompok tani, dsb.) (*unfavorable*)	8	13,33	33	55,00	0	0,00	15	25,00	4	6,67
Tidak menerima pendapatan usaha tani apapun selama lahan sawah bera selain rumput untuk ternak	6	10,00	20	33,33	3	5,00	25	41,67	6	10,00
Pendapatan dari pekerjaan sampingan lebih besar dibandingkan pendapatan pertanian	4	6,67	13	21,67	15	25,00	23	38,33	5	8,33

Sumber: Olah Data Primer (2024)

Hasil FGD 2 digunakan untuk *cross-check* hasil penelitian dari FGD 1 dan survei dengan menekankan pandangan dari pemangku kebijakan baik di tingkat kecamatan/kapanewon hingga Kabupaten Sleman. Selain itu, FGD 2 digunakan untuk memetakan kebijakan-kebijakan pendukung yang telah disahkan dan dilaksanakan dalam upaya mendukung aktivitas usaha tani sawah. FGD 2 membahas problematika dan solusi lahan sawah bera dari aspek teknis dan aspek sosial ekonomi berdasarkan pandangan pemangku kebijakan. Adapun hasil FGD2 adalah sebagai berikut:

1. Dari aspek teknis, didapatkan informasi bahwa pendekatan pengendalian gangguan hama tikus telah dilakukan dengan memfasilitasi pengadaan stimulan obat/racun tikus dari dinas/pemerintah kapanewon. Gerdal massal juga dilakukan secara rutin setiap 1 tahun sekali dimana petani yang mampu menangkap 1 tikus selama kegiatan berlangsung maka akan mendapatkan imbalan uang sebesar 3 ribu rupiah. Solusi yang sedang terus diupayakan Bersama adalah penerapan konsep sistem Pengelolaan Hama Terpadu (PHT) lanskap melalui tanam serempak. Gangguan teknis lain terkait ketersediaan air telah dilakukan berbagai Upaya mengatasinya melalui penerbitan Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Air, Program RJIT (Rehabilitas Jaringan Irigasi Tersier), pembentukan KOMIR (Komisi Isigasi) yang fokus pada pengaturan jadwal, Program IRPOM (Irigasi Perpompaan), penggerakan P3A (Petani Pemakai Air), dan sosialisasi panen di Bulan September. Seluruh pihak terkait dengan irigasi perlu memadukan langkah-langkah yang ada sebagai upaya pembagian air yang adil dan bijaksana. Kerjasama seluruh *stakeholders* diperlukan agar segala upaya yang telah dilakukan dapat diaplikasikan di lapangan sesuai peruntukannya secara optimal.
2. Dari segi ekonomi, diperoleh informasi bahwa masalah permodalan dan biaya operasional tinggi dapat diatasi dengan menanam komoditas potensial yang minim diserang tikus seperti Talas Pratama. Sosialisasi telah dilakukan dengan kolaborasi antara Bappeda, UPTD BP4 Kapanewon Moyudan, dan Tim Peneliti Lahan sawah bera

Fakultas Pertanian UGM. Pengembangan budidaya talas dilanjutkan agar petani memperoleh pendapatan selain padi. Budidaya Talas Pratama cenderung mudah ditanam, serapan pasar tinggi, keuntungan menjanjika dimana setiap biaya sebesar 1 rupiah akan memberi keuntungan sebesar 63 rupiah. Penguatan modal bagi petani dapat dilakukan dengan mengakses Program UPT Penguatan Modal Tanpa Anggungan melalui kelompok tani. Modalnya cukup komoditas yang sedang diusahakan. Pengajuan penguatan modal dilakukan kelompok tani dengan rekomendasi dinas untuk kemudan diajukan ke Pemda dan UPT. Kontribusi bunga relatif rendah yaitu 3% setahun tergantung komoditas dengan agunan sertifikat kelompok. Solusi sulitnya pemasaran hasil-hasil pertanian telah coba diatasi menggunakan sistem Titik Kumpul. Saat ini, Kabupaten Sleman memiliki 19 Titik Kumpul hampir di seluruh kecamatan/kapanewon, kecuali Kapanewon Depok. Titik kumpul ini antara lain: Kapanewon Pakem, Kapanewon Kalasan, Kapanewon Turi, Kapanewon Sleman, Kapanewon Seyegan, Kapanewon Ngaglik, Kapanewon Ngemplak, Kapanewon Kapanewon Tempel, Kapanewon Brebah, Kapanewon Cangkringan, dan Kapanewon Minggir.

3. Dari segi sosial, didapatkan alternatif pendekatan solusi antara lain dengan melibatkan petani senior untuk diharapkan dapat mengajak dan merangkul generasi petani yang lebih muda dalam mengusahakan kembali lahan sawah bera berkepanjangan. Petani milenial (muda) cenderung lebih mudah untuk menerima teknologi baru. Pemerintah tidak perlu mengambil alih lahan yang sudah lama bera karena lahan tersebut dapat diambil alih oleh petani milenial (muda). Selain itu, program pelatihan untuk Petani Milenial di Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki target dalam 1 tahun harus mampu mencetak minimal 200 petani milenial tambahan. Fungsi program ini adalah untuk menumbuhkan generasi muda. Program Petani Milenial berfokus pada kegiatan pelatihan-pelatihan khusus untuk petani di bawah umur 40 tahun. Saat ini, kompetensi petani melienial di Sleman Barat relatif

ketinggalan dibanding Timur sehingga peranannya di sektor pertanian belum tampak.

PEMBAHASAN

Optimalisasi lahan sawah bera di Kapanewon Moyudan menghadapi persoalan yang kompleks baik dari segi teknis, sosial, dan ekonomi. Ketiga aspek ini sesungguhnya saling berkaitan dalam membentuk pola pikir petani. Di sisi lain, Kapanewon Moyudan dituntut untuk dapat mempertahankan posisinya sebagai lahan pertanian (sawah abadi) di Kabupaten Sleman. Hal ini berarti perlu adanya upaya penggerakan agar lahan sawah tidak terlalu lama tertidur.

Hasil FGD 1 dan penelitian survei dengan petani lahan sawah bera menemukan bahwa masalah teknis utamanya adalah karena ketersediaan air dan serangan hama tikus. Kesediaan air dipicu oleh saluran irigasi tersier yang rusak, pembagian air antara petani lahan sawah dengan kegiatan budidaya perikanan, serta kemarau yang panjang menyebabkan curah hujan sangat rendah. Petani dianjurkan untuk menanam komoditas menguntungkan lainnya yang toleran terhadap keterbatasan air seperti komoditas palawija namun petani masih bertahan dengan komoditas padi. Dalam FGD 2, pemangku kebijakan menjelaskan bahwa tersedia banyak pelatihan budidiaya yang bisa diakses oleh petani melalui kelompok tani dan PPL. Pelatihan pun tidak terbatas pada kegiatan *on farm* namun juga kegiatan *off farm*. Permasalahan teknis lain teridentifikasi adanya serangan hama tikus yang masif dan sulit dikendalikan. Solusi tanam serempak terus dilakukan namun petani masih belum menjalankannya. Ada rasa ketidakamanan pada diri petani terhadap sistem tanam serempak karena dianggap siapa yang menanam paling awal dan paling akhir akan menderita kerugian paling besar. Permasalah di aspek sosial kemudian terkait dalam hal ini.

Permasalahan sosial petani memiliki proporsi cukup serius dalam hal membangkitkan petani untuk mengaktifkan kembali lahan sawah bera. Permasalahan utama yang muncul di aspek sosial dalam FGD 1, FGD 2, dan penelitian survei adalah dominasi petani umur tua serta rendahnya kepercayaan antarpetani dan PPL. Renerasi petani terjadi dengan lambat dan petani tua masih menguasai lahan-lahan sawah di Kapanewon Moyudan. Banyak generasi muda yang tidak tertarik untuk menggeluti usaha tani. Beberapa pemuda yang sudah terjun sebagai

petani belum mampu menjadi *role model* bagi teman-teman sebayanya. Kondisi ini yang membuat daya tarik profesi petani belum memikat anak muda Kapanewon Moyudan. Pertumbuhan petani muda di Kabupaten Sleman bagian barat memang cenderung lebih lambat dibandingkan di Kabupaten Sleman bagian timur. Aktifitas Petani Milenial pada akhirnya banyak terpusat di bagian timur Kabupaten Sleman. Di sisi lain, semakin meluasnya lahan sawah bera mengakibatkan kegiatan pertanian menjadi pasif. Petani jarang bertemu satu sama lain dan kegiatan gotong-royong perlahan memudar. Beberapa petani memiliki pekerjaan sampingan non-pertanian sehingga frekuensi bertemu menjadi semakin berkurang. Kondisi ini berpengaruh pada eksistensi kelembagaan dan perannya termasuk dalam membentuk modal sosial masyarakat tani. Menurut Ahn dan Ostrom dalam Castiglione *et al* (2010), kerangka tindakan kolektif (*collective-action framework*) dapat menggambarkan eksistensi modal sosial dalam suatu komunitas. Penekanan teori modal sosial terdapat di jaringan (*network*) dan konstruksi dari kepercayaan (*trust*), norma (*norm*), dan institusi (*institution*) melalui interaksi individu yang cocok dengan dasar tindakan kolektif. Rendahnya modal sosial mengakibatkan keputusan tanam serempak (*collective-action*) sangat sulit tercapai. Perlu ada penguatan kelembagaan di tingkat petani untuk menumbuhkan kembali rasa percaya, rasa berbagi, rasa memiliki, semangat gotong royong, nilai-nilai kebersamaan, dan upaya membangun jaringan untuk kepentingan semua pihak.

Problematika lahan sawah bera dalam aspek ekonomi bermuara pada masalah permodalan dan biaya produksi. Berdasarkan hasil penelitian survei, petani tidak pernah terkendala dengan pasar selama mereka menanam padi. Mereka berpendapat padi adalah komoditas strategis mengingat mereka juga menanam untuk konsumsi sendiri bahkan dengan persentasi yang lebih banyak. Petani mengeluhkan permodalan karena subsidi sarana produksi (saprodi) semakin terbatas dan birokrasi bantuan semakin panjang dan berliku, seperti contohnya kartu tani. Pupuk yang selama ini selalu mereka dapatkan dengan sistem subsidi semakin sulit diakses. Di sisi lain, harga pupuk non-subsidi tergolong mahal begitu pula saprodi lainnya seperti benih/bibit dan pestisida. Petani masih banyak yang belum mau membuat pupuk organik sendiri dengan alasan keterbatasan

tenaga. Pada akhirnya lahan sawah diabaikan hingga tanah menjadi mengeras dan gulma tumbuh dengan lebat (lihat Gambar 1). Pembersihan gulma tentu saja membutuhkan biaya operasional yang tidak sedikit begitu juga olah tanah permukaan yang terlanjur keras. Olah lahan membutuhkan alsintan yang mampu membalik tanah permukaan. Tidak banyak petani dan kelompok tani memiliki alsintan tersebut. Alhasil, petani harus mencari alsintan dan operator hingga ke luar desa dengan konsekuensi menunggu giliran/antrian penyewa. Di antara permasalah aspek ekonomi, petani menjadi sasaran bantuan beras raskin yang kemudian semakin melemahkan dorongan mereka untuk menjalankan usaha tani karena merasa kebutuhan pangan telah tercukupi.

Petani Kapanewon Moyudan memerlukan diversifikasi, utamanya pada komoditas yang mereka usahakan. Petani hingga saat ini terus bertahan pada pendapatnya bahwa hanya padi yang cocok di tanam di lahan pertanian miliknya. Pemasalahan sesungguhnya berasal dari sulitnya petani membuka diri untuk belajar membudidayakan komoditas non-padi. Pemerintah daerah telah banyak memberikan peluang pelatihan bagi petani yang ingin memperluas usaha taninya ke komoditas non-padi. Akan tetapi, upaya-upaya tersebut selalu ditolak. Dalam penelitian ini, dilakukan pula diseminasi budidaya komoditas Talas Pratama dengan pertimbangan bahwa komoditas ini mampu mengatasi problematika teknis terkait ketersediaan air dan serangan hama tikus. Dari sisi ekonomi, budidaya Talas Pratama memiliki nilai ekonomis yang menjanjikan, sudah memiliki pasar, dan menjadi salah satu bahan baku yang sedang tren di kalangan masyarakat urban. Proses budidaya pun cukup mudah sehingga modal dan biaya produksi terjangkau. Ketersediaan bibit dapat diusahakan sendiri dari umbi tanaman. Di tinjau dari segi aspek sosial, diversifikasi komoditas tanam akan berpengaruh pada diversifikasi pangan keluarga petani. Asupan gizi dari kombinasi makanan akan dapat tercapai dibandingkan tanpa ada variasi sama sekali. Kolaborasi petani tua dan petani muda juga dapat ditingkatkan dengan adanya komoditas baru di lahan sawah. Petani tua dapat belajar bersama petani muda untuk budidaya Talas Pratama di lahan sawah bera. Kolaborasi dapat berlanjut hingga pasca panen dan penjualan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi

terkini yang dikuasai oleh petani muda. Demplot Talas Pratama dapat dilihat pada Gambar 5.

Gambar 5. Demplot Talas Pratama di Kalurahan Sumberrahayu Kapanewon Moyudan
Sumber: Dokumentasi Pribadi (2024)

Keberlanjutan upaya mengatasi lahan sawah bera adalah dengan memastkan adanya sinergi pentahelix yang melibatkan kolaborasi 5 (lima) elemen kunci pemangku kepentingan (*stakeholders*) yaitu Akademisi, Bisnis, Komunitas, Pemerintah, dan Media dengan pembagian peran sebagai berikut:

1. Akademisi yang identik sebagai sumber pengetahuan berperan mengkonsep program pembangunan masyarakat tani yang berbasis identifikasi masalah dan potensi serta pendekatan kajian literatur untuk kondisi di Kapanewon Moyudan. Perguruan tinggi dapat berperan sebagai akademisi melalui kegiatan peneliti yang mengkaji dan merumuskan potensi, masalah, serta solusi untuk masalah lahan sawah bera dari berbagai pendekatan keilmuan (multidisiplin ilmu).
2. Bisnis dihadirkan untuk memberikan nilai tambah produk pertanian dan menjamin terjadinya keberlanjutan. Keberadaan elemen bisnis dalam konteks permasalahan lahan sawah bera perlukan dalam menggerakkan kegiatan usaha tani dari hulu hingga hilir utamanya untuk memenuhi kebutuhan saprodi dan alsintan serta kebutuhan pasar yang menyerap hasil produksi pertanian baik segar maupun olahan.
3. Komunitas berperan sebagai aktor penghubung pemangku kepentingan. Kelompok tani dan gapoktan adalah komunitas paling ideal untuk permasalahan lahan sawah bera mengingat visi, misi, dan tujuannya adalah untuk kesejahteraan anggota tani. Permasalahan tanam serempak juga perlu diwadahi dalam kelompok tani dan/atau gapoktan yang solid dan menjunjung tinggi kepentingan bersama.
4. Pemerintah memiliki posisi strategis sebagai regulator, koordinator, dan fasilitator dalam implementasi setiap kebijakan. Pada permasalahan

lahan sawah bera, pemerintah perlu menetapkan kabijakan penelantaran lahan pertanian untuk mencegah peningkatan yang signifikan. Pemerintah juga perlu menetapkan kebijakan yang mendukung kegiatan usaha tani di lahan-lahan potensi pertanian agar masyarakat terdorong untuk tetap menekuni kegiatan pertanian. Pemerintah diharapkan terus memperbaharui peraturan-peraturan yang mendukung konsumsi pangan lokal dan diversifikasi pangan lokal seperti pada Perpres Nomor 81 Tahun 2024 tentang percepatan penganekaragaman berbasis sumber daya lokal. Peraturan ini juga mendukung upaya perubahan mindset petani yang sangan fanatik terhadap komoditas padi. Pemerinta juga dapat menjadi koorditor dalam audiensi pemangku kepentingan dalam merumuskan serta mengevaluasi program dan peraturan. Selain itu, pemerintah dapat menjadi fasilitator dalam penyediaan infrastruktur dan layanan publik untuk mempermudah masyarakat tani mengakses saprodi, alsintan, pasar, serta pelatihan.

5. Media memegang peranan dalam publikasi berita sekaligus promosi produk atau jasa layanan untuk membangun citra dan menggiring opini publik dalam masyarakat. Pemberitaan permasalahan lahan sawah bera di media akan menarik perhatian dan menjadi kajian bersama yang akhirnya akan menarik semakin banyak pihak untuk bersinergi mencari solusi. Media juga dapat menggiring opini tentang lahan sawah bera dan bagaimana dampaknya bagi keberlanjutan pertanian dan ketahanan pangan baik regional maupun nasional.

Kolaborasi pentahelix yang terkait dengan permasalahan lahan sawah bera di Kapanowon Moyudan sudah mulai dilaksanakan melalui kolaborasi yang dilakukan antara Pemerintah (Bappeda, Dinas Pertanian, UPTD BP4 Moyudan dan PPL, Kepala Desa), Komunitas (Kelompok Tani dan Gapoktan), serta Akademisi (Tim Peneliti Fakultas Pertanian UGM). Elemen bisnis sudah mulai diperkenalkan terutama untuk mendukung pemasaran hasil panen petani Talas Pratama sebagai komoditas alternatif pengganti padi. Pelibatan media telah dilakukan melalui salah satu platform berita online dengan

mengangkat pelaksanaan Demplot Talas Pratama di Kalurahan Sumberrahayu Kapanewon Moyudan. Peran bisnis dan media akan lebih dimaksimalkan sebagai upaya pengurangan lahan sawah bera berkepanjangan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Problematika lahan sawah bera di Kapanewon Moyudan Kabupaten Sleman dapat diatasi ketika akar permasalahannya terselesaikan. Hasil analisis penelitian ini menunjukkan bahwa ada 3 (tiga) aspek permasalahan lahan sawah bera yaitu teknis (ketersediaan air dan serangan hama tikus), ekonomi (keterbatasan permodalan dan biaya operasional tinggi), dan sosial (regenerasi petani rendah dan kepercayaan petani rendah). Pendekatan solusi yang dilakukan adalah: (1) demplot komoditas Talas Pratama dengan pertimbangan bahwa komoditas ini tidak membutuhkan banyak air dan tahan serangan tikus; (2) memperkuat modal finansial petani dalam bentuk skema bantuan pengadaan saprodi dan alsintan yang sesuai dengan hasil identifikasi kebutuhan; (3) meningkat peran petani muda sehingga dapat menjadi *role model* yang memotivasi pemuda lokal untuk terjun ke pertanian; dan (4) memperkuat kepercayaan petani dengan meningkatkan modal sosial pada kelompok tani dan PPL.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penelitian ini didukung pendanaan dari Skema Hibah Penelitian Terapan Tahun 2024 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sleman

DAFTAR PUSTAKA

Ahn, T.K. dan Ostrom, E. (2010) Chapter 3: Social Capital and Collective Action dalam Castiglione, D., Van Deth, J. W., dan Wolleb, G. (2010) The Handbook of Social Capital. New York: Oxford University Press.

Bryman, A. (2016) Social Research Methods, 5th edition. New York: Oxford University Press.

Badan Pusat Statistik Indonesia (2024) Katalog Statistik Indonesia 2024 Volume 52. Badan Pusat Statiskik.

Creswell, J. W. (2014) Research Design: Qualitative, Quantitative and Mix Methods Approach, 4th edition. CA Sage.

Martono, R. & Andriani, V. (2021). *Arahan Penggunaan Lahan di Kabupaten Sleman Indonesia*. Paper dipresentasikan pada FIT ISI Smart Surveyors in The New Normal Area. Semarang. Prosiding FIT ISI Vol 1, 2021 (187-193).